

EDISI : Selasa, 12 Februari 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



Nama Media: *Fajar Bali*

Kategori: *Musrenbang*



## Buleleng Fokuskan Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan



FB/AGUS

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana membuka konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan pemukulan gong

**PEMERINTAH** Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabu-

» KE H AL. 11

# Buleleng Fokuskan Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan

DARI HALAMAN 1

paten Buleleng Tahun 2020 dirangkaikan dengan pembukaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2019.

Pada kegiatan ini terungkap fokus pembangunan tahun 2020 adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST ditandai dengan pemukulan gong di Banyualit Spa and Resort Kalibukbuk, Senin (11/2) pagi kemarin.

Acara ini mengusung tema 'peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna percepatan pembangunan ekonomi inklusif berbasis pertanian dan

penanggulangan kemiskinan'. Alasan utama pengembangan sektor pertanian karena pertanian memberikan *local intense* yang cukup dominan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Bupati Suradnyana mengajak seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan pergerakan, misalnya masuk ke tiga desa di satu kecamatan yang paling miskin agar bisa terintegrasi dengan baik. Nantinya jika para pimpinan SKPD dapat mengubah pola pikirnya, maka sudah pasti akan mendapatkan perannya masing-masing. "Jadi di sini tugas dari Bappeda Litbang hanya mengharmonisasikan saja, saya minta seluruh pimpinan SKPD yang hadir saat ini agar mengubah paradigma sehingga semua bisa

masuk didalamnya," ujarnya.

Lebih lanjut, melalui ajang ini dirinya berharap agar para pimpinan SKPD tidak selalu mengunci diri serta dapat membuka wawasan yang luas. Dengan menyelesaikan pergerakan di tiga desa di masing-masing kecamatan terlebih dahulu sehingga mereka akan menemukan perannya masing-masing dalam ajang ini. "Semua tugasnya dalam perspektif pengentasan kemiskinan yang benar-benar terintegrasi," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng Ir. Nyoman Genep, MT yang ditemui se usai acara mengatakan disamping Buleleng sebagai basis pertanian, sebagian besar yang bek-

erja di sektor pertanian adalah masyarakat miskin sehingga lebih mudah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pertanian.

"Nanti kita akan identifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan yang ada di tiga desa tiap-tiap kecamatan di Buleleng," paparnya. Untuk diketahui, angka kemiskinan yang tercatat di Kabupaten Buleleng jumlahnya sekitar 35.200 jiwa atau kurang lebih 5,6% di tahun 2018. Untuk menentukan tiga desa termiskin di tiap kecamatan, dirinya akan merumuskan bersama dengan SKPD lainnya apakah dari sisi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin terbanyak, atau persentase. "Ini masukan dari BPS yang kami terima, kemungkinan dua cara itu yang akan kita lakukan sebagai pendekatan," pungkasnya. W-008



a Media: *Fajar Bali*

Kategori: *Bandara*

## Dewan Sayangkan Bandara Buleleng Kelas LCC



*Nengah Tamba*

FB/HERU

### DENPASAR-Fajar Bali

Rencana pembangunan Bandara dikawasan Bali Utara sangat disayangkan oleh Komisi III DPRD Bali. Pasalnya, Bandara kelas LCC (Low Cost Carrier).

Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menyatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan Bandara dikawasan Bali Utara untuk pemerataan. Hanya saja, pihaknya sangat menyayangkan jika Bandara yang rencananya akan dibangun di Kubutambahan tersebut untuk pesawat-pesawat kecil. "LCC itu pesawat yang murah. Mungkin saja nanti pe-

» KE H AL. 11

## Dewan Sayangkan Bandara Buleleng Kelas LCC

### DARI HALAMAN 1

sawatnya yang baling-baling (perintis) itu. Kalau begitu yang dirancang, untuk apa?," ujarnya, Senin (11/02).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi yang menyebutkan bahwa Bandara Buleleng kelas LCC. Dengan demikian, bisa jadi kedepan Bandara di Buleleng bukan internasional. "Kalau LCC,

Bandara bukan internasional. (Hanya) satu Runway, bandara biasa saja," tegasnya. Padahal, tujuan lain dibangunnya Bandara di Buleleng untuk mengurangi kepadatan di Bandara Ngurah Rai.

Tamba menyarankan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemprov Bali supaya memberikan peluang kepada investor local untuk membangun Bandara. Seperti diketahui, sudah ada dua investor asal

Bali yang siap membangun yakni PT. BIBU dan PT. Pembari. Kedua investor tersebut menawarkan dua konsep pembangunan yang berbeda. PT. BIBU dengan pembangunan diatas laut, sedangkan PT. Pembari diatas daratan. "Saya sarankan kepada Pak Gubernur diujilah kompetensi masing-masing (investor)," sarannya. Komisi III merasa kasihan dengan kedua investor, terkesan dibuat mengambang. **W-011**



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media:

Kategori: **RABIES**

### Buleleng Masih Daerah Merah Rabies

## Wabup Sutjidra Dukung Vaksinasi Rabies Massal Serentak

**SINGARAJA - Fajar Bali**

Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG mendukung penuh imunisasi anjing yang akan dilakukan serentak di seluruh Bali oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali. Imunisasi anjing secara serentak akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Dukungan tersebut diungkapkan saat Wabup Sutjidra menerima audiensi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, drh. I Wayan Mardiana, MM di ruang kerja Wakil Bupati Buleleng, Senin (11/2) pagi kemarin.

Wabup Sutjidra usai audiensi menjelaskan dukungannya terhadap vaksinasi rabies massal serentak yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali mengingat Kabupaten Buleleng masih menjadi daerah merah untuk kasus rabies. Pada tahun 2018 sampai dengan awal 2019 ini masih ada kasus rabies yang harus ditangani. "Vaksinasi ini untuk meminimalisasi dan mengeliminasi anjing-anjing yang masih mengidap rabies,"

jelasnya.

Wakil Bupati asal Desa Bonatihing, Kecamatan Kubutambahan ini pun mengungkapkan ada 32 desa yang masih ada positif rabies sehingga Buleleng menjadi daerah yang merah untuk rabies. Jumlah tersebut yang harus dikejar minimal 90 persen untuk seluruh anjing-anjing yang ada di Kabupaten Buleleng. Vaksinasi rabies massal serentak ini sangat membantu untuk mencapai target tersebut. "Tanggal 11 Maret mendatang kita akan mulai bersama Dinas Peternakan Provinsi Bali selama sebulan penuh. Sejumlah kurang lebih 81.000 anjing menjadi target," ungkap Sutjidra.

Kepala Dinas Peternakan, drh. I Wayan Mardiana, MM usai audiensi menyebut di Kabupaten Buleleng kasus rabiesnya masih cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2018 masih ada korban jiwa terkait dengan kasus rabies. Oleh karena itu, percepatan pengendalian rabies sangat diperlukan di seluruh Bali pada tahun



FB/AGUS

**AUDIENSI** - Wabup Sutjidra menerima audiensi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, drh. I Wayan Mardiana

2019 dan 2020. "Kita akan lakukan percepatan pengendalian rabies melalui vaksinasi massal serentak di sembilan kabupaten/kota yang pada bulan Maret nanti selama 30 hari penuh," sebutnya.

Estimasi jumlah populasi anjing di Kabupaten Buleleng adalah 91.000. Dengan estimasi tersebut cakupan vaksinasi tersebut cakupan vaksinasi sejumlah 95 persen dari populasi. Sehingga targetnya adalah

kurang lebih 89.000 harus tervaksin. Oleh karena itu, pihaknya melakukan audiensi guna memperoleh dukungan dari bupati/wakil bupati untuk menginstruksikan ke jajaran sampai ke tingkat desa mengenai vaksinasi massal serentak ini. "Agar masyarakat membantu memegang atau mengikat anjingnya saat vaksinasi massal digelar," pungkaskan Wayan Mardiana. **W-008**



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Media: *Pajalar Bali*

Kategori: *Pengeroda*

# Dewan Pesimis Perda BPR Tuntas pada Masa Sidang I/ 2019

SINGARAJA - Fajar Bali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng sepertinya sangat pesimis dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang membahas perubahan status BPR Buleleng 45 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah bisa selesai pada masa sidang pertama Tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus III DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana saat dikonfirmasi di DPRD Buleleng, Senin (11/2) siang kemarin. Bahkan Tirta mengatakan pansus III DPRD Buleleng sudah sempat melakukan komparasi ke sejumlah daerah yang memiliki aturan mengenai perseroan daerah. Seperti Jombang dan Bangli. Di Kabupaten Jombang misalnya, perda sudah ditetapkan dan telah berlaku. Perda itu memiliki landasan naskah akademik yang kuat. "Kalau kita di Buleleng harus memiliki naskah akademiknya dulu agar tidak seperti di Bangli. Dimana Bangli perdanya sudah jadi. Tapi naskah akademiknya tidak ada,



FB/AGUS

*Putu Tirta Adnyana*

sehingga ditegur kementerian. Harus ada naskah akademiknya dulu. Makanya hal ini sangat perlu dilakukan kajian dengan matang," jelas Tirta.

Menurut Tirta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala daerah wajib mengusulkan ranperda tentang BUMD kepada Kemendagri. Usulan itu dilampiri dengan analisa, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan dae-

rah. Apabila telah mendapat izin dari pejabat kementerian, baru dilanjutkan dengan pembahasan. "Saya belum tahu. Ranperda yang diajukan eksekutif ini sudah ada persetujuan menteri atau belum. Naskah akademiknya juga masih kami tunggu, sampai sekarang belum kami terima," imbuhnya.

Politisi Partai Golongan Karya itu menyatakan, naskah akademik mutlak dibutuhkan. Sebab perubahan status BPR Buleleng 45 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, membutuhkan banyak landasan hukum. Selain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, juga dibutuhkan landasan yang terkait UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Perseroan Terbatas.

Tirta Adnyana mengaku pesimistis. "Saya belum bisa, karena naskah akademik belum ada. pembahasannya tidak akan optimal. Tapi ya kembali lagi ke kemauan daerah. Kalau naskah akademik ada, bisa segera kita bahas. Tapi naskah akademik itu kan perlu penelitian biar dapat kajian yang komprehensif," pungkas Tirta. **W-008**



Nama Media: *PAPAR BALE*

Kategori: *Pertanian*

SELASA, 12 FEBRUARI 201... ah

Selamat Pagi  
Pak Gubernur



## Mohon Dukungan Pembangunan Irradiator Game



Ir. I Made Sumiarta

FB/AGUS

**PEMERINTAH** Kabupaten (Pemkab)  
Buleleng yang dikoordinir Badan Peren-  
canaan Pembangunan Daerah, Penelitian,  
dan Pengembangan (Bappeda Litbang)

» KE H AL. 11

# Mohon Dukungan Pembangunan Irradiator Game

## DARI HALAMAN 1

Kabupaten Buleleng bersama dengan instansi terkait telah mengajukan proposal ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk pembangunan Irradiator Gamma di Kabupaten Buleleng.

Dengan proposal ini diharapkan pembangunan irradiator gamma bisa terwujud. Pengajuan proposal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Ir. I Made Sumiarta saat ditemui usai penyerapan masukan klian subak se-Buleleng di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng beberapa hari yang lalu.

Sumiarta menjelaskan den-

gan dikoordinir oleh Bappeda Litbang bersama Dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Perikanan telah membahas usulan proposal tersebut. Pertemuan pun dilakukan dengan pihak Batan sehingga pembangunan irradiator gamma dibiayai oleh APBN. "Dimulai dari Buleleng sehingga Buleleng menjadi *pilot project*," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng ini menjelaskan, setelah proposal masuk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster akan menga-

wal seluruh proses. Termasuk mengadakan pertemuan dengan Bappeda dan Dinas Pertanian se-Bali untuk memetakan produk-produk pertanian yang ada di Provinsi Bali.

Hal ini dikarenakan irradiator gamma ini cakupannya tidak hanya Bali saja. "Untuk pengawetan buah-buahan tidak menutup kemungkinan juga produk yang berasal dari luar Bali bisa masuk," pungkas Sumiarta. Pemkab Buleleng sendiri mengajukan proposal sejumlah Rp. 150 Milyar untuk pembangunan irradiator gamma ini kepada BATAN. Pengajuan proposal ini juga terkait dengan perjanjian Pemkab Buleleng dengan Batan yang telah ditan-

yang lalu.

Nantinya, Batan juga akan mengawal seluruh proses yang masuk. Bahkan dirinya sangat mengharapkan dengan adanya hal itu dirinya juga sangat mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Bali utamanya kepada Gubernur Bali Wayan Koster bisa memberikan dukungan sehingga apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Buleleng bisa segera dapat terwujud. "Terakhir harapan Buleleng adanya dukungan serta upaya pemerintah Provinsi Bali utamanya Gubernur Bali Wayan Koster sehingga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan pemerintah bisa segera terwujud dengan baik," tutupnya. **W-008**